

Keketuaan Indonesia dalam Forum Foreign Policy and Global Health Tahun 2013

Joevi Roedyati¹⁰

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia

E-mail: joevi 2001@hotmail

Abstract: Successful development of the health sector, will greatly affect the development and support the efforts of political, economic, social and cultural as well as the implementation of the foreign policy of a country. A state has a high quality health services to the people, will support the full development process of the country. The health sector development will also create development opportunities and other related sectors, such as the development of the pharmaceutical sector, health insurance and so on. Furthermore, the health sector's high capacity can be used as an instrument of diplomacy when negotiating or lobbying with other countries. Cuba, for example, has sent thousands of doctors around the world, including Indonesia, which in the event of natural disaster tsunami. This reflects the fact, the close connection between foreign policy with the health sector, so that the sector should be getting your full attention because it involves the national interest of a country in it.

Keywords : foreign policy, development, health sector, instrument, diplomacy

Abstrak: Keberhasilan pengembangan sektor kesehatan, akan sangat mempengaruhi pembangunan dan mendukung upaya-upaya pembangunan politik, ekonomi, social budaya serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu Negara. Suatu Negara yang memiliki kualitas tinggi dalam pelayanan kesehatan kepada rakyatnya akan mendukung secara penuh proses pembangunan negaranya. Pembangunan di sektor kesehatan ini juga akan menciptakan kesempatan pengembangan sektor lain yang terkait, yaitu misalnya pengembangan sektor farmasi, bisnis asuransi kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya, kapasitas tinggi sektor kesehatan ini dapat dipergunakan sebagai instrument diplomasi pada saat melakukan negosiasi atau lobbying dengan Negara lain. Cuba, misalnya, telah mengirimkan ribuan dokter-dokternya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu pada saat terjadi bencana alam Tsunami. Kenyataan ini mencerminkan, adanya hubungan yang erat antara kebijakan luar negeri dengan sektor kesehatan, sehingga sektor ini harus memperoleh perhatian penuh karena menyangkut kepentingan nasional suatu Negara di dalamnya.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri, pengembangan, faktor kesehatan, instrumen, diplomasi

Peluncuran Inisiatif FPGH di Oslo tahun 2007

Millennium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan di tahun 2000 telah menghasilkan poin sasaran pembangunan yaitu di bidang kesehatan untuk dicapai pada tahun 2015, sejak saat itu perhatian terhadap isu kesehatan global semakin meningkat.

Peluncuran inisiatif *Foreign Policy & Global Health* (FPGH) & *Oslo Declaration* yang diprakarsai 7 Menteri Luar Negeri di Oslo, Norwegia pada tahun 2007 ditujukan sebagai upaya untuk mensinergikan kebijakan politik

luar negeri dengan isu kesehatan global dan nasional. Hal ini disebabkan semakin rentannya kondisi kesehatan di suatu negara dengan negara lain(*public health risks & threats*), dimana karena pergerakan manusia, hewan dan tumbuhan serta terjadinya perubahan iklim global semakin terasa dampaknya, dimana suatu ancaman dari suatu *disease* atau epidemi tidak mengenal batas negara lagi.

Tantangan utama menyangkut isu kesehatan global saat ini adalah adanya peningkatan ancaman kesehatan berupa

¹⁰ Dalam kapasitas pribadi. Semua bahan dipergunakan sesuai dengan alur pemikiran si penulis, untuk memperkenalkan *Foreign Policy for*

Global Health dan beberapa rekomendasi yang mungkin ditimbulkan dari isu ini.

semakin tinggi dan berbahayanya tingkat patogenitas dari virus, bakteri dan fungus. Untuk menangani kompleksitas isu penanganan penyakit dan kesehatan global tersebut, dibutuhkan suatu upaya yang bersifat komprehensif dan global yang disebut sebagai *Global Health Governance*.

Suatu negara dituntut untuk memiliki diplomasi di bidang kesehatan global yang baik dan mensinergikannya sebagai isu yang cukup penting di dalam kebijakan luar negeri untuk dapat membentuk *Global Health Governance*, walaupun saat ini belum terjadi keseimbangan yang cukup adil antara negara maju dan negara yang sedang membangun, hal mana disebabkan karena berbagai faktor seperti tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula halnya mengenai negosiasi isu kesehatan global tersebut yang tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pandangan politis setiap negara yang memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh sebab itu, pelaku diplomasi kesehatan global dituntut untuk memahami nuansa dan dinamika negosiasi serta menggunakan keahlian diplomasi.

Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri pada saat menerima kunjungan Putri Astrid dari Belgia bulan April 2012 yang lalu, disampaikan bahwa kesehatan merupakan salah satu pilar politik luar negeri Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan cerminan atas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya untuk meningkatkan peranannya di dalam menjaga keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya isu kesehatan global ini maka diperlukan peningkatan kapasitas pelaku diplomasi. Peningkatan kapasitas pelaku

diplomasi dalam masalah kesehatan global juga harus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika *global health governance* dan dinamika hubungan negara Utara-Selatan, yang dapat diamati pada kasus virus H5N1.

Sejak merebaknya kasus virus H5N1 pada tahun 2007, Indonesia terus memperjuangkan agar vaksin yang diproduksi dari sampel virus yang dimiliki oleh Indonesia tersebut dapat dinikmati manfaatnya tidak hanya oleh negara maju, tetapi juga negara berkembang. Oleh karena itu Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi *World Health Assembly (WHA) 64/58* mengenai *Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework: sharing influenza viruses and access to vaccines and other benefits* pada tahun 2011 di Jenewa. *Framework* ini mengikat negara-negara anggota WHO dan pihak swasta/industri dalam melindungi *global public health* dengan prinsip kesetaraan, adil dan menguntungkan semua pihak, sekaligus menggantikan *framework* lama *Global Influenza Surveillance Network (GISN)* yang banyak menuai kritikan.

Keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan mekanisme *access and benefit sharing* tersebut telah memberikan sebuah pelajaran diplomasi yang berharga dan tak dapat terlepas dari riset yang intensif terhadap isu virus dan vaksin, pendekatan terus menerus kepada negara-negara berkembang, dan kesamaan visi yang terjalin antara pemangku kepentingan di dalam negeri.

Di samping isu pembagian virus, beberapa isu kesehatan global yang perlu mendapat perhatian politik luar negeri Indonesia adalah isu vaksin polio, reformasi WHO, *counterfeit medical program*, *social determinants of health*, dan penanganan isu *Framework Convention on Tobacco Control*

(FCTC).

Di samping isu pembagian virus, beberapa isu kesehatan global yang perlu mendapat perhatian politik luar negeri Indonesia adalah isu vaksin polio, reformasi WHO, *counterfeit medical program*, *social determinants of health*, dan penanganan isu *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC).

Isu lain yang cukup penting bagi Indonesia adalah isu kekayaan hak intelektual, dimana dewasa ini telah terjadi pergeseran dalam memandang virus dari *common heritage of mankind* menjadi sumber daya genetik sesuai dengan *Nagoya Protocol* yang baru disepakati tahun 2010 lalu. Virus juga dipandang sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara yang harus dijamin pembagian manfaatnya dan dilindungi dari pencurian hayati (*biopiracy*). Dengan nilai perdagangan sumber daya hayati yang diprediksi mencapai US\$ 5 triliun pada tahun 2050, terbuka peluang bagi Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan perdagangan vaksin dan obat-obatan di masa yang akan datang.

Theory of leadership

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerjasama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kepemimpinan / leadership memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. (Training Leadership. Quotes).

Di dalam kenyataan, tidak semua orang yang menduduki jabatan pemimpin memiliki kemampuan untuk memimpin atau memiliki 'kepemimpinan' (leadership), sebaliknya banyak orang yang memiliki bakat kepemimpinan tetapi

tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Sedang pengertian 'kepala' menunjukkan segi formal dari jabatan pemimpin saja, maksudnya secara yuridis-formal setiap orang dapat saja diangkat mengepalai sesuatu usaha atau bagian (berdasarkan surat keputusan atau surat pengangkatan), walaupun belum tentu orang yang bersangkutan mampu menggerakkan mempengaruhi dan membimbing bawahannya serta (memimpin) memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Demikian juga dengan kondisi suatu Negara, pada suatu hubungan tertentu, baik yang bersifat bilateral atau yang multilateral. Dalam interaksi yang melibatkan banyak Negara ini, suatu Negara dapat menjadi pemimpin yaitu Negara-negara yang memiliki keunggulan relative lebih besar dibandingkan anggota Negara lainnya. Pada isu *Global Health*, Indonesia, dipandang oleh Negara-negara lain sebagai suatu Negara besar yang memiliki potensi sumber vaksin dan rekayasa medis serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan global ini, sehingga Indonesia amat penting posisinya untuk memimpin pensosialisasian issue kesehatan global dan penyebaran informasi mengenai kesehatan, seperti kerjasama penanganan endemic, epidemic dsb.

Sementara itu ilmuwan French and Raven, dalam buku mereka mengenai Power, tahun 1960 telah mendefinisikan 4 tipe kepemimpinan, yaitu 1) Power yang bersifat kekerasan, yang didasarkan pada kemampuan untuk menghukum, memberikan sanksi dan menekan pihak lain, 2) Power yang berasal dari kemampuan pengetahuan, keahlian dan kepakaran, 3) Power yang berasal dari kewenangan atau posisi otoritas, 4) Power yang didapatkan dari kemampuan untuk memberikan

hadiah atau manfaat dari suatu tindakan.

Dilihat dari keempat tipologi Power tersebut, kepemimpinan Indonesia dalam keketuaannya di Forum FPGH tahun 2013 ini adalah diperoleh dari kemampuan Indonesia dalam mengkombinasikan kemampuan pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam penanganan suatu epidemic dan endemic semacam Flu Burung (virus H2N1) dan keinginan kuat dari pihak pemerintah untuk memberikan hasil penelitiannya tersebut untuk dibagikan kepada negara-negara lain yang memerlukan.

Pembahasan

Forum Foreign Policy and Global Health

Salah satu forum diplomasi kesehatan yang telah menjadi ajang *exercise* kemampuan diplomasi kesehatan Indonesia adalah inisiatif *Foreign Policy and Global Health* (FPGH). Inisiatif ini digagas oleh tujuh negara utama yakni *Indonesia, Thailand, Norwegia, Perancis, Brazil, Afrika Selatan dan Senegal*. Mekanisme kerja sama yang diterapkan antar tujuh negara ini bersifat *loose* yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan penyusunan inisiatif bersama di berbagai forum terkait seperti Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, dan *World Health Assembly*. Sebagai salah satu wujud nyata kerja sama FPGH, Sidang Majelis Umum PBB dalam empat tahun terakhir telah mengadopsi Resolusi tentang “*Global Health and Foreign Policy*”. Disamping itu, negara-negara FPGH juga menaruh perhatian pada isu lainnya seperti reformasi WHO, agenda pembangunan berkelanjutan Rio+20 dan *global health governance*. Indonesia akan menggantikan posisi Perancis sebagai ketua Forum *Foreign Policy and Global Health* pada tahun 2013.

Round Table Discussion mengenai Global Health di Bogor, Juni 2009

Pada tanggal 3 Juni 2009, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Organisasi Internasional, BPPK. Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan *Roundtable Discussion* bertema “*The Role of Foreign Policy in Synergizing Global Health Policy for the Realization of the Millennium Development Goals*” di Bogor. Diskusi dimaksudkan sebagai forum pertukaran pikiran dan pandangan di antara para pemangku kepentingan mengenai upaya untuk menyinergikan kebijakan kesehatan dalam formulasi politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan upaya untuk memajukan kesehatan sebagai isu politik luar negeri dalam agenda internasional, menyusun *road map* pengembangan kapasitas diplomasi kesehatan dan upaya pemanfaatan mekanisme kerjasama Internasional untuk mengembangkan kapasitas dalam negeri guna menangani kasus-kasus *pandemic* dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) terkait sektor kesehatan.

Diskusi menghadirkan 4 (empat) pembicara, yaitu : Duta Besar Norwegia, Mr. Eivind S. Homme; Dr. Subhash Raghunath Salunke, *WHO Representative to Indonesia*; Dr. Widjaya Lukito, Penasehat Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kebijakan Kesehatan Publik; Sunu Soemarno, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang; dan pembahas yaitu Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Kepala Institut Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan. Diskusi dihadiri oleh sekitar 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari kalangan praktisi diplomasi, praktisi bidang kesehatan, pemerhati masalah hubungan internasional, wakil-wakil dari lembaga peneliti, akademisi, LSM dan masyarakat umum lainnya.

Dalam *roundtable discussion* ini dibahas upaya-upaya peningkatan penggunaan lensa kesehatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sasarannya antara lain adalah untuk menggerakkan kebijakan luar negeri yang memperhatikan masalah-masalah kesehatan sesuai dengan Deklarasi Oslo tahun 2007 yang pada pokoknya berisi kesepakatan untuk memasukkan aspek kesehatan dalam pembahasan maupun keputusan politik luar negeri; membangun kerjasama dalam penanganan *global health security* di fora bilateral, regional maupun multilateral; menempatkan isu kesehatan sebagai elemen kunci dalam pencapaian MDGs; menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas penanganan isu perdagangan internasional yang disesuaikan dengan *Doha Principles*; dan mengutamakan tindakan kesehatan dalam penanganan krisis, konflik dan upaya rekonstruksi.

Selain *Oslo Declaration*, serangkaian langkah yang mengindikasikan upaya serius masyarakat internasional untuk menyinergikan kesehatan dalam formulasi politik luar antara lain yaitu melalui pengeluaran resolusi mengenai kesehatan global dan politik luar negeri oleh Majelis Umum PBB, pembahasan isu politik luar negeri dan kesehatan dalam *Annual Ministerial Review of ECOSOC* pada bulan Juli, dan bergabungnya Indonesia dalam *Network of Global Leaders* yang kemudian diikuti oleh diselenggarakannya *Sherpa Meeting for the Networks* di Bali.

Isu kesehatan disadari memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan dipandang sebagai investasi dalam membangun martabat manusia yang pada gilirannya akan sangat menunjang dalam program pembangunan ekonomi bangsa. Dalam konteks ini, ancaman terhadap kesehatan

dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara. Contohnya antara lain: penyebaran berbagai jenis penyakit mematikan yang menimbulkan pandemik yang bersifat lintas negara seperti HIV/AIDS, SARS, flu burung, dan flu babi. Oleh karena itu, isu kesehatan merupakan isu vital dan sangat berhubungan dengan politik internasional dewasa ini.

Menurut World Health Organization (WHO), program *WHO Health for All* ditujukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang mempunyai akses kepada fasilitas kesehatan yang berkualitas atau terlindungi dengan jaminan keamanan secara finansial sehingga tidak ada satu pun individu atau keluarga terhimpit oleh bencana besar (*catastrophic*) yang kemudian menjerumuskannya ke dalam kemiskinan. Terkait program di atas, WHO mengeluarkan *WHO Global Health Agenda*, yaitu: investasi bidang kesehatan, membangun keamanan kesehatan individu dan global, memperjuangkan HAM, kesetaraan gender, memperbaiki faktor-faktor penentu bidang kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengembangkan teknologi dan sains, dan memperkuat governance serta kepemimpinan.

WHO Global Agenda sebagaimana disebut di atas sejalan dengan tujuan MDGs (penanggulangan masalah kemiskinan, pendidikan, gender, kematian anak, kematian ibu, HIV/AIDS malaria dan penyakit lain, lingkungan, kemitraan global) yang ditargetkan dicapai pada tahun 2015. Upaya perbaikan dalam bidang kesehatan merupakan hal yang vital mengingat kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Namun dalam pelaksanaannya terutama di negara-negara berkembang masih menemui kendala utama, yaitu pendanaan. Kendala dana ini dirasa makin

besar karena adanya pemotongan anggaran kesehatan menyusul kesulitan keuangan negara-negara berkembang akibat adanya krisis finansial global akhir-akhir ini.

Dalam konteks Indonesia, pencapaian tujuan MDGs terkait bidang kesehatan sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Menurut laporan BPS, angka kematian anak turun 30% menjadi 19 per 1000 kelahiran pada tahun 2005 dibandingkan tahun 1990. Angka kematian ibu turun 30% menjadi 228 kematian per 100.000 persalinan pada tahun 2005 dibandingkan 2002. Demikian pula pencapaian Indonesia dalam menanggulangi penyakit malaria, tuberculosis dan HIV/AIDS. Sementara pencapaian Indonesia dalam tujuan MDGs di atas sudah cukup baik, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perhatian pada penyakit-penyakit *cardiovascular* dan *endroine* yang secara umum bersumber dari rokok.

Guna menanggulangi permasalahan di atas, perlu ditentukan *strategic approaches* untuk mencapai MDGs bidang kesehatan melalui: *sustainable high-level political commitment*, mobilisasi berbagai sumber aksi bersama meningkatkan kesehatan, menggunakan lensa kesehatan dalam kebijakan publik, dan peningkatan investasi bidang kesehatan serta penguatan sistem kesehatan yang ditujukan pada tersedianya akses kesehatan untuk semua orang.

Isu kesehatan adalah isu yang terlalu penting bila dibebankan kepada Menteri Kesehatan saja. Masalah kesehatan juga merupakan bagian dari isu keamanan. Untuk itu diperlukan adanya upaya memahami isu kesehatan dan kemudian mengintegrasikannya dengan isu keamanan dan politik luar negeri. Pada titik ini upaya menyinergikan masalah kesehatan dengan kebijakan luar negeri menjadi lebih jelas.

Pada tingkat nasional, untuk memecahkan masalah kesehatan di suatu negara, aktor-aktor kunci seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan menteri-menteri lain perlu dilibatkan. Misi utama penanggulangan masalah kesehatan ini adalah untuk mencegah agar tidak berkembang menjadi resesi sosial yang tentunya lebih rumit penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia. Sedangkan pada tingkat internasional, perlu digarisbawahi bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat mengatasi sendiri masalah penularan penyakit global seperti HIV/AIDS, SARS, H5N1 dan H1N1. Sebaliknya untuk menanggulangi tantangan kesehatan global diperlukan kerjasama internasional multi-sektoral.

Terkait hal di atas, Indonesia sangat berkepentingan merumuskan suatu diplomasi kesehatan (*Health Diplomacy*) yang merupakan hasil dari upaya menyinergikan kebijakan kesehatan dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Perumusan diplomasi kesehatan ini ditujukan untuk menjembatani kepentingan Indonesia dalam kerjasama internasional baik dalam forum multilateral maupun bilateral. Menurut wakil dari Departemen Kesehatan RI, hingga saat ini inisiatif Indonesia dalam bidang *health diplomacy* yang diterima masyarakat internasional antara lain: *Standard Material Transfer Agreement* (SMTA) untuk mengatur penggunaan virus secara bersama, pengaturan penggunaan bersama sampel virus berikut pemanfaatannya, dan pendirian *Advisory Mechanism* dan *Tracking System*.

Pada tanggal 27 September 2012, penulis memiliki kesempatan untuk mengadakan interview dan tukar pikiran dengan Kementrian Kesehatan Thailand dan beberapa pakar senior di UN-ESCAP Bangkok, Thailand,

beberapa pemikiran, opini dan pandangan mereka adalah antara lain :

Isu Isu Kesehatan Global yang dihadapi Indonesia dan kawasan Asia Pasifik versi UN-ESCAP:

1. Tingkat kesehatan ibu melahirkan di kawasan Asia Pasifik yang menurut data masih cukup rendah dan membutuhkan upaya percepatan untuk dapat mencapai tujuan *Millennium Development Goals* (MDG) 5 pada tahun 2015; Indonesia termasuk dalam Negara yang belum mencapai tujuan MDG's ini;
2. Pemberantasan HIV/AIDS, utamanya menyangkut akses pelayanan kesehatan bagi semua kalangan dan menghilangkan hambatan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS di beberapa negara Asia, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan mendekatkan layanan kesehatan kepada orang-orang dengan resiko tertular HIV/AIDS, suatu pendekatan yang dapat dipelajari dari China dan Kamboja;
3. Pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, yang pada masa lalu menjadi program yang berhasil diterapkan di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, namun saat ini mengalami stagnasi dan perlu direvitalisasi kembali;
4. *Universal Health Coverage*, yaitu suatu sistem asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat membuka akses pelayanan kesehatan bagi semua kalangan. Saat ini dibutuhkan suatu sistem asuransi kesehatan yang bisa dipergunakan di seluruh negara Asia-Pasifik, mengingat

meningkatnya *migration of labour* di kawasan ini; UN ESCAP mengusulkan dibentuknya suatu institusi penjamin pemberian pelayanan kesehatan yang bisa berlaku di seluruh kawasan Asia Pasifik;

5. *Ageing Population*, suatu kondisi peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut yang dialami oleh beberapa negara Asia sebagai akibat meningkatnya tingkat harapan hidup penduduk sehingga memunculkan permintaan atas SDM di bidang kesehatan dari negara-negara lain. Hal ini memunculkan resiko berkurangnya SDM bidang kesehatan di beberapa Negara;
6. Penyakit-penyakit tidak menular/*non-communicable disease*, yang diperkirakan akan terus bertambah jumlah maupun jenisnya, dan berpotensi menjadi ancaman kesehatan di masa mendatang seiring dengan perubahan gaya hidup manusia dan berkurangnya daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, dunia juga dituntut untuk secara cepat mengantisipasi bilamana terjadi mutasi virus seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Kesimpulan

Isu kesehatan adalah isu yang terlalu penting bila dibebankan kepada Menteri Kesehatan saja. Masalah kesehatan juga merupakan bagian dari isu keamanan. Untuk itu diperlukan adanya upaya memahami isu kesehatan dan kemudian mengintegrasikannya dengan isu keamanan dan politik luar negeri. Pada titik ini upaya menyinergikan masalah kesehatan dengan kebijakan luar negeri menjadi lebih jelas.

Indonesia sebagai negara dengan keunggulan dalam industri farmasi dan memiliki jenis virus yang sangat penting bagi pembuatan vaksin global (misalnya Virus H2N1, polio, dan sebagainya), harus dapat menjadikan Indonesia sebagai pendorong agenda-agenda isu kesehatan global. Indonesia juga dianggap sebagai negara mitra kunci, utamanya dalam mendorong isu kesehatan global di tingkat ASEAN dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum ini. Pentingnya mengedepankan prinsip *one region one voice* di kawasan Asia Tenggara, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Thailand kepada kami, merupakan salah satu opsi yang harus diperjuangkan Indonesia dalam forum FPGH tahun 2013 ini.

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi "*leader*" bagi isu kesehatan global, dan kepemimpinan Indonesia dalam *forum Foreign Policy for Global Health* (FPGH) tahun ini harus dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pembentukan forum, dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi pemecahan masalah kesehatan, baik di dalam negeri Indonesia, kawasan ASEAN, maupun dunia.

Tujuan akhir dari Forum FPGH adalah untuk mencapai kesetaraan pengetahuan mengenai penanganan isu-isu kesehatan global, menata system pelayanan kesehatan global, dan memecahkan berbagai permasalahan kesehatan global yang timbul dalam masa-masa terkini, baik yang secara tradisional masih dialami oleh Negara-negara berkembang, maupun permasalahan baru yang dihadapi oleh Negara-negara maju di dunia.

Daftar Referensi

Briefing paper by David P.Fidler, :Assesing the Foreign Policy and Global Health Initiative: The Meaning of Oslo

Process", June 2011

Laman "Training for Leadership"

French and Raven, "The Power", 1960

Laporan P3K OI, BPPK, Kemenlu RI, Juni 2009